PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BANK INDONESIA (BI)**

UNIT KERJA : **DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SOLIKIN M. JUHRO**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **247049**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 13.444.050.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 576 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 4.120.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.648.000.000
3. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 973.350.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 283.250.000
5. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 124.350.000
6. Tanah Seluas 213 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 115.100.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/206 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 6.180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 611.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**1.135.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**2.150.000.000**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**2.165.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**19.505.050.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**19.505.050.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.